

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Manajemen

Kata manajemen berasal dari Bahasa Latin, yaitu dari asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. Kata-kata tersebut digabungkan menjadi kata *managere* yang artinya menangani. Dalam Bahasa Inggris kata ini berbentuk kata benda yaitu *management*. Manajemen telah ada sejak adanya manusia, namun era ilmu manajemen ilmu baru muncul pada tahun 1900an. Manajemen ilmiah dipopulerkan oleh Frederick Winslow Taylor dalam bukunya *Principles of Scientific Management* yang diterbitkan pada tahun 1911. Dalam buku tersebut Taylor menerapkan cara-cara ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah dalam perusahaan dan menghilangkan sistem coba-coba.

Empat prinsip dasar pemikiran ilmiah Taylor dalam Stoner dan Freeman (1989:37), yaitu:

1. Perkembangan ilmu manajemen, menerapkan metode terbaik untuk melakukan setiap tugas.
2. Pemilihan ilmiah dari para pekerja, setiap pekerja akan diberi tanggung jawab untuk tugas tertentu.
3. Pendidikan ilmiah dan pengembangan pekerja.
4. Kerjasama antara manajemen dan tenaga kerja.

Tokoh manajemen klasik lainnya yang memberikan gagasan tentang konsep manajemen adalah Henry Laurence Gant. Gant dalam Usman (2010:26)

mengembangkan empat prinsip Taylor yang terkenal dengan sebutan prinsip Gant, yaitu: 1) kerjasama harus saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu manajemen dan pekerja, 2) seleksi ilmiah pekerja, 3) sistem bonus untuk merangsang pekerja, 4) instruksi-instruksi kerja yang rinci.

Dari beberapa prinsip manajemen yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh manajemen di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen dalam sebuah organisasi dapat dirancang dengan memperhatikan: 1) pembagian tugas dengan membuat divisi untuk setiap pekerjaan, 2) setiap divisi diisi oleh para profesional sesuai keahlian, 3) kerjasama dan hubungan baik antara pimpinan dan bawahan dan antar divisi, 4) pemberian penghargaan untuk memberikan motivasi kepada pekerja

2.2 Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam kegiatannya sebagai subyek dan obyek pendidikan. Perilaku manusia tersebut terbentuk oleh interaksi antar manusia, organisasi dan sistem yang dianut. Manajemen pendidikan juga dapat dimaknai sebagai suatu proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan semua sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah seni atau ilmu mengelola sumberdaya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Engkoswara (2001:2) memberikan pengertian manajemen pendidikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumberdaya pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan bagaimana menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta di dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Menurut Usman (2010:13) ada beberapa manfaat manajemen pendidikan, antara lain:

- (1) Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan dan bermakna.
- (2) Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- (3) Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
- (4) Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan.
- (5) Teratasinya masalah mutu pendidikan karena 80% masalah mutu disebabkan oleh manajemennya.
- (6) Terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel.
- (7) Meningkatkan citra positif pendidikan.

Untuk mencapai tujuannya, pendidikan juga memerlukan manajemen agar semua elemen pendidikan dapat terkoordinir. Sebagaimana halnya pada manajemen secara umum, manajemen pendidikan meliputi empat hal pokok, yaitu:

- a. Perencanaan pendidikan yaitu persiapan semua komponen pendidikan untuk melaksanakan proses belajar mengajar sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

- b. Pengorganisasian pendidikan yaitu mensinergikan potensi dari semua komponen pendidikan dalam suatu organisasi yang dapat menyelenggarakan pendidikan dengan efektif.
- c. Pengerjaan pendidikan yaitu penyelenggaraan pendidikan yang telah direncanakan oleh anggota suatu organisasi pendidikan untuk mencapai hasil yang optimal.
- d. Pengendalian pendidikan yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan agar semua komponen bergerak secara sinergis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. (Rivai dan Murni, 2010)

Keempat hal pokok di atas dimaksudkan untuk menghasilkan keluaran secara optimal seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan pendidikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya manajemen pendidikan merupakan suatu bentuk penerapan manajemen dalam mengelola, mengatur dan mengalokasikan sumber daya yang terdapat dalam dunia pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan merupakan alat untuk mengintegrasikan peran serta semua sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan.

2.3 Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan

Pembangunan dalam bidang pendidikan membutuhkan suatu perencanaan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Depdiknas (2006) mencanangkan pemerataan dan perluasan akses melalui penguatan beberapa program sebagai berikut:

1. Pendanaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan wajib belajar.
3. Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Perluasan pendidikan wajib belajar pada jalur nonformal
5. Perluasan akses pendidikan keaksaraan bagi penduduk berusia di bawah 15 tahun yang buta aksara agar mereka memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung sesuai standar keaksaraan.
6. Perluasan akses SLB dan sekolah inklusif sehingga memperluas akses pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan belajar karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi bakat istimewa atau kecerdasan luar biasa.
7. Pengembangan pendidikan layanan khusus bagi anak usia wajib belajar pendidikan dasar di daerah terpencil/kepulauan, daerah yang berpenduduk jarang dan berpencar, daerah bencana, daerah konflik, serta daerah terisolasi dan anak jalana.
8. Perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mendorong terselenggaranya pendidikan bagi anak-anak berusia 0-6 tahun.
9. Pemerintah memberikan dukungan atau pemberdayaan bagi terselenggaranya pelayanan PAUD yang bermutu oleh masyarakat secara merata di seluruh pelosok tanah air.
10. Pendidikan kecakapan hidup bagi peserta didik yang orangtuanya miskin dan orang dewasa miskin dan/atau pengangguran.
11. Perluasan akses SMA/SMK dan SM Terpadu untuk mencapai komposisi jumlah SMA dan SMK yang seimbang.
12. Perluasan akses perguruan tinggi dengan menargetkan pencapaian jumlah mahasiswa.
13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pembelajaran jarak jauh.
14. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perluasan akses SMA/SMK/SM Terpadu, SLB, dan Perguruan Tinggi.

Pendanaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun merupakan prioritas tertinggi untuk lima tahun ke depan. BOS dimaksudkan untuk menutup biaya minimal operasional pembelajaran yang memadai. Dengan bantuan BOS diharapkan akan tercipta suatu landasan yang kokoh bagi upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Kebijakan ini akan mewujudkan ‘pendidikan dasar gratis’, yang diartikan sebagai bebas biaya secara bertahap.

Pemerintah juga menyediakan sarana dan prasarana pendidikan wajib belajar untuk mendukung perluasan akses pendidikan dasar dalam program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Penyediaan sarana dan prasarana untuk SD/MI/ sederajat mencakup penambahan sarana untuk pendidikan layanan khusus dan rehabilitasi serta revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak. Sedangkan untuk SMP/MTs/ sederajat, kebijakan ini diarahkan untuk membangun unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, dan buku pelajaran. Diharapkan dengan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dasar.

Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah dan kualifikasi guru profesional di berbagai jenjang dan jenis pendidikan, pemerataan penyebaran secara geografis, keahlian dan kesetaraan gender. Pemerataan secara geografis mempertimbangkan pengaturan mekanisme penempatan dan redistribusi guru, sistem insentif guru di daerah terpencil, pengangkatan guru tidak tetap secara selektif, serta tenaga pendidikan lainnya seperti pamong belajar pada jalur nonformal.

Kejar Paket A, Kejar Paket B, SMP Terbuka dan SD-SMP 'Satu Atap', Guru Kunjung dan Kelas Layanan Khusus di SD (KLK) adalah kebijakan pemerintah pada jalur nonformal. Program Kejar Paket A dan Kejar Paket B dapat menjangkau peserta didik yang memiliki berbagai keterbatasan untuk mengikuti pendidikan formal seperti anak-anak dari keluarga tidak mampu, daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah konflik, atau anak-anak yang terpaksa bekerja.

Peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan belajar karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi bakat istimewa atau kecerdasan luar biasa pemerintah akan membangun Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Inklusi. Dengan kebijakan ini diharapkan jumlah penyandang buta aksara latin dan angka, buta bahasa Indonesia dan buta pengetahuan dasar akan menurun jumlahnya.

Bagi peserta didik yang orangtuanya miskin dan orang dewasa miskin atau pengangguran pemerintah akan memberikan kompetensi yang dapat dijadikan modal untuk usaha mandiri atau bekerja sehingga kemiskinan dan pengangguran dapat ditanggulangi.

Data dari BPS 2004 menunjukkan bahwa lulusan pendidikan menengah kurang memiliki keterampilan untuk masuk lapangan pekerjaan. Hal itu terlihat dari kenyataan bahwa 65% penganggur terdidik adalah lulusan pendidikan menengah (BPS 2004 dalam Depdiknas 2006). Karena itu pemerintah akan memperluas akses SMA dan SMK sehingga jumlah SMA dan SMK akan seimbang.

Perluasan akses perguruan tinggi dengan menargetkan pencapaian jumlah mahasiswa dilakukan dengan mendorong pihak swasta untuk membangun institusi baru. Sementara itu peran pemerintah lebih pada pengembangan pendidikan vokasi dan profesi pada perguruan tinggi yang sudah ada.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 – 2014

disusun berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005--2025, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Renstra Kemendiknas 2010-2014 mengacu pada visi RPJMN 2010-2014 yaitu Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Program pembangunan pendidikan serta Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2005--2025 yang telah dijabarkan ke dalam empat tema pembangunan pendidikan, yaitu peningkatan kapasitas dan modernisasi (2005 – 2009), penguatan pelayanan (2010 – 2015), penguatan daya saing regional (2015 – 2020), dan penguatan daya saing internasional (2020 – 2025).

Renstra Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 – 2014 disusun sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang hendak dicapai dalam periode 2010 – 2014 dengan mempertimbangkan capaian pembangunan pendidikan hingga saat ini. Renstra Kemendiknas disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan di pusat dan daerah, serta partisipasi seluruh pejabat Kemendiknas. Renstra Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014 ini merupakan dasar dan pedoman bagi Unit Eselon I, II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, dan sebagai acuan bagi SKPD Pendidikan di Provinsi dan Kab/Kota dalam menyusun (1) Rencana Strategis (Renstra); (2) Rencana Kerja (Renja); (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Pendidikan;

(4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Pendidikan Nasional; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

Dari uraian rencana strategis di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan bertujuan untuk mendukung terlaksananya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Diharapkan dengan adanya penguatan program-program tersebut di atas Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bisa tuntas pada tahun 2012. Program pemerataan dan perluasan akses pendidikan ini akan bisa berhasil mencapai target bila dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu rencana strategis pembangunan pendidikan di atas memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang terpadu dengan melibatkan sumber daya yang ada di pusat maupun daerah.

2.4 Kebijakan Pendidikan Dasar

Pendidikan tingkat dasar adalah bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara yang usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Juga merupakan sebuah investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa Indonesia. Karena hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global maka program pendidikan untuk semua diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan

sistem pendidikan terbuka dan demokratis serta berkesetaraan gender agar dapat menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial.

Paradigma tersebut menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis, yaitu layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Keberpihakan diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah khusus, pendidikan layanan khusus, ataupun pendidikan nonformal dan informal, pendidikan dengan sistem guru kunjung, pendidikan jarak jauh, dan bentuk pendidikan khusus lain yang sejenis sehingga menjamin terselenggaranya pendidikan yang demokratis, merata, dan berkeadilan serta berkesetaraan gender.

Menurut survei yang dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia, yaitu di bawah Vietnam. Sedangkan menurut data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia pada tahun 2000, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Memasuki abad ke- 21 ini dunia pendidikan di Indonesia semakin menghadapi hal yang sulit. Banyak pihak menuding sistem pendidikan di Indonesia tidak cukup tangguh untuk menyiapkan manusia Indonesia yang mampu menghadapi multi krisis. Selain itu Indonesia sebagai bagian dari warga dunia tidak mungkin menutup diri dari negara-negara lain. Untuk dapat tetap bertahan menghadapi persaingan itu Indonesia harus menyiapkan warga

negaranya agar dapat menjadi pemain yang mampu bersaing dengan negara-negara lain.

Menghadapi era globalisasi tersebut sangatlah penting memperhatikan mutu pendidikan di negara kita, karena pendidikan adalah salah satu penopang untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui mutu pendidikan kita masih jauh dari yang diharapkan, terutama bila dibandingkan dengan negara lain. Untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia dapat dilakukan melalui peningkatan mutu pendidikan Indonesia agar dapat menghasilkan generasi yang mampu bersaing dalam era persaingan global.

Rendahnya mutu pendidikan kita tersebut bisa dirasakan hampir di setiap jenjang mulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Dapat dipastikan hal itulah penghambat penyediaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di negara kita.

Pendidikan adalah sebuah subsistem di dalam sistem pemerintahan sehingga ada saling ketergantungan antara pendidikan dengan subsistem yang lain seperti politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan ideologi. Sementara sebagai sebuah sistem yang kompleks, pendidikan terdiri atas berbagai elemen yang saling mempengaruhi dalam suatu alur masukan → proses → keluaran. Menurut Rivai

& Murni (2009) permasalahan dalam bidang pendidikan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Permasalahan pendidikan sebagai suatu subsistem:
 - a. Berlakunya sistem ekonomi kapitalis membuat penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu pelayanan pemerintah kepada rakyatnya yang disertai pembayaran sejumlah biaya oleh rakyat kepada negara. Dalam hal ini pendidikan dianggap sebagai suatu jasa komoditas yang hanya dapat diakses oleh orang kaya saja.
 - b. Kehidupan sosial yang berlandaskan sekularisme telah menumbuhkan paham hedonisme, permisivisme, dan materialistik. Oleh karenanya penyelenggaraan pendidikan pada masyarakat ini bertujuan untuk mendapatkan hasil/materi atau keterampilan hidup saja.
2. Permasalahan pendidikan sebagai suatu sistem yang kompleks:
 - a. Adanya keterbatasan fasilitas pendidikan, seperti aksesibilitas dan daya tampung, kerusakan sarana prasarana kelas, dan kekurangan jumlah tenaga pendidik.
 - b. Rendahnya efisiensi, seperti kinerja dan kesejahteraan guru yang belum optimal, proses pembelajaran yang masih konvensional serta jumlah buku yang belum memadai.
 - c. Otonomi pendidikan yang menyerahkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada lembaga pendidikan dan bukan lagi menjadi tanggung jawab negara.
 - d. Belum ada relevansi antara kurikulum yang diajarkan dengan kecakapan hidup (*life skills*) yang dibutuhkan, belum berbasis pada masyarakat dan

potensi daerah, serta belum mengoptimalkan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri.

Dapat disimpulkan bahwa penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standardisasi pengajaran. Oleh karena itu dibutuhkan solusi yang tepat untuk memecahkan permasalahan di atas dengan membangun komitmen bersama pemerintah dan masyarakat.

Tindak lanjut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu tujuan pendidikan nasional ditetapkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.

Pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan adalah dengan melakukan kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru/Kelas Baru serta rehabilitasi ruang kelas. Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk mengenyam pendidikan. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan ini sangat penting bagi penuntasan

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar ini dilakukan secara adil dan merata, terutama bagi mereka yang mengalami hambatan ekonomi dan sosial budaya (miskin, hambatan geografis, daerah perbatasan, dan daerah terpencil), maupun hambatan atau kelainan fisik, emosi, mental dan intelektual.

Beberapa kebijakan strategis pendidikan dasar yang disusun untuk memperluas dan pemeratakan akses adalah sebagai berikut:

1. Memperluas akses pendidikan bagi anak usia dini (0-6 tahun), agar mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi atau tahap perkembangan mereka sehingga mereka siap mengikuti pendidikan di TK atau SD.
2. Menghapus hambatan biaya (*cost barriers*) melalui pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) bagi semua siswa pada jenjang pendidikan dasar. Dana BOS ini disalurkan kepada siswa-siswa di sekolah umum maupun madrasah, baik negeri maupun swasta. Besar bantuan yang diberikan dihitung berdasarkan *unit cost* per siswa dikalikan dengan jumlah seluruh siswa pada jenjang tersebut.
3. Memperhatikan secara khusus kesetaraan gender serta pendidikan di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah konflik, perbatasan dan lain-lain.
4. Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), serta advokasi kepada masyarakat agar mereka makin sadar akan pentingnya pendidikan dengan mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah dan/atau mempertahankan anak-anak mereka untuk tetap bersekolah.

5. Melaksanakan advokasi bagi pengambil keputusan, baik di eksekutif maupun legislatif dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada pembangunan pendidikan.
6. Memanfaatkan secara optimal sarana radio, televisi, komputer dan perangkat TIK lainnya untuk digunakan sebagai media pembelajaran dan pendidikan jarak jauh. Hal ini terutama dilakukan untuk daerah terpencil dan mengalami hambatan dalam transportasi, serta daerah yang jarang penduduknya.

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar akan dilakukan dengan berupaya menarik semua anak usia sekolah yang sama sekali belum pernah sekolah, menarik kembali siswa putus sekolah, dan menarik lulusan SD/MI atau pendidikan setara yang tidak melanjutkan pendidikan.

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar, yaitu:

1. Memberikan bantuan biaya operasional dengan target pada tahun 2009 setiap siswa pada satuan pendidikan dasar memperoleh bantuan ini.
2. Menyediakan perpustakaan dan buku teks pelajaran maupun buku non teks pelajaran.
3. Merehabilitasi ruang kelas yang rusak sebagai upaya untuk menyediakan sarana pendidikan yang layak bagi pendidikan dasar.
4. Membangun Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk menampung peningkatan jumlah lulusan SD/MI.
5. Mendirikan SD-SMP satu atap berupa penambahan tingkat kelas (*extended classes*) untuk menyelenggarakan pendidikan menengah pertama pada setiap SD Negeri di daerah terpencil dan berpenduduk jarang atau terpencar.
6. Menyelenggarakan Kelas Layanan Khusus (KLK) di SD sebagai layanan pendidikan bagi anak usia sekolah dasar yang putus sekolah atau sama sekali belum pernah belajar di SD (Depdiknas: 2009)

Pendidikan nasional berfungsi sebagai alat utama untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa. Pendidikan pada hakekatnya merupakan investasi tidak langsung (*indirect investment*) bagi proses produksi dan investasi langsung (*direct investment*) bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (*human quality*). Pendidikan akan meningkatkan dan mempertinggi kualitas tenaga kerja, sehingga memungkinkan tersedianya angkatan kerja yang lebih terampil, handal dan sesuai dengan tuntutan pembangunan serta meningkatkan produktivitas nasional. Berbagai penelitian di sejumlah negara maju telah membuktikan bahwa pendidikan memiliki kontribusi yang sangat tinggi terhadap produktivitas nasional, dan dapat meningkatkan pendapatan nasional.

Muhibbin Syah dalam Ilyas (2009) yang merujuk kepada pemikiran Jean Piaget dan L. Kohlberg mengemukakan bahwa pendidikan dilihat dari sudut psikososial merupakan upaya penumbuhkembangan sumber daya manusia melalui proses hubungan interpersonal yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat yang terorganisir dalam hal ini masyarakat pendidikan dan keluarga. Peran dan fungsi serta tanggung jawab pendidikan semakin besar bahkan menentukan, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang bermutu ini membutuhkan dukungan dari berbagai faktor lingkungan keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Sejarah menunjukkan bahwa faktor terpenting yang menentukan keberhasilan suatu bangsa bukanlah melimpahnya kekayaan alam melainkan sumber daya

manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam era kedua kebangkitan nasional, SDM yang berkualitas adalah yang :

1. Memiliki kemampuan dan menguasai keahlian dalam suatu bidang yang berkaitan dengan Iptek.
2. Mampu bekerja secara profesional dengan orientasi mutu dan keunggulan;
3. Dapat menghasilkan karya-karya unggul dan mampu bersaing secara global sebagai hasil dari keahlian dan profesionalismenya.

Dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sebuah bangsa akan sanggup belajar dari kenyataan yang serba dinamis, sanggup mencari jalan alternatif pemecahan masalah, serta sanggup mengembangkan pola-pola pemikiran yang pada akhirnya akan dapat melahirkan strategis persaingan unggul di era global.

Landasan pokok keberadaan sistem pendidikan nasional adalah UUD 1945 Bab XIII, Pasal 31, ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Hal ini mengandung implikasi bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu memberi kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara. Dengan demikian, dalam penerimaan seseorang sebagai peserta didik, tidak dibenarkan adanya perlakuan yang berbeda yang didasarkan atas jenis kelamin, agama, ras, suku, latar belakang sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merumuskan Visi Kemendiknas 2014 untuk menghasilkan SDM yang berkualitas tersebut yaitu: terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif. Layanan prima tersebut artinya:

1. Tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara
2. Terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
3. Berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
4. Setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; dan
5. Menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri

Untuk mencapai visi Kemendiknas 2014, Misi Kemendiknas 2010 – 2014 dikemas dalam Misi 5K sebagai berikut:

Tabel 2.1 Misi 5K Kemendiknas Tahun 2010 – 2014

Kode	Misi
M 1	Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan
M 2	Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan
M 3	Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan
M 4	Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan
M 5	Meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan

Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

- (1) Penyediaan pendidik Pendidikan Dasar berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan guru SD/SDLB dan SMP/SMPLB serta tutor Paket A dan Paket B berkompeten;
- (2) Penyediaan manajemen SD/SDLB dan SMP/SMPLB serta Paket A dan Paket B berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas, dan tenaga administrasi;
- (3) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan dasar, serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan dasar;
- (4) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SD/SDLB dan SMP/SMPLB berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- (5) Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SD/SDLB dan SMP/SMPLB berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- (6) Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran Paket A dan B berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010)

Pada era otonomi daerah seperti sekarang ini, peran pemerintah daerah sangat vital dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. Keberpihakan, kepedulian serta tindakan nyata dari pemerintah daerah akan sangat menentukan produk pendidikan dimasa mendatang. Hal itu bisa dilakukan melalui pembebasan biaya pendidikan yang dirasakan sangat membebani masyarakat, peningkatan fasilitas pendidikan, pemberian insentif bagi guru, pemberian beasiswa, dan peningkatan kualitas pendidik.

Namun pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Sampai saat ini masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antar kelompok masyarakat

terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin dan antara pedesaan dan perkotaan. Sebagai gambaran, dengan rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APS) – rasio penduduk yang bersekolah – untuk kelompok usia 13-15 tahun pada tahun 2003 mencapai 81,01 persen.

Partisipasi pendidikan kelompok penduduk miskin juga masih jauh lebih rendah dibandingkan penduduk kaya khususnya untuk jenjang SMP/ MTs ke atas dengan menggunakan indikator APK. APK SMP/ MTs untuk kelompok termiskin baru mencapai 61,13 persen, sementara kelompok terkaya sudah hampir mencapai 100 persen. Untuk jenjang pendidikan menengah kesenjangan tampak sangat nyata dengan APK kelompok termiskin terbesar 23,17 persen dan APK kelompok terkaya sebesar 81,66 persen. Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas juga menunjukkan perbedaan yang signifikan yaitu sebesar 4,01 persen untuk kelompok terkaya dan 16,9 persen untuk kelompok termiskin (Ilyas, 2009)

Pada saat yang sama partisipasi pendidikan penduduk pedesaan masih jauh lebih rendah dibandingkan penduduk perkotaan. Rata-rata APS penduduk pedesaan usia 13 - 15 tahun pada tahun 2003 adalah 75,6 persen, sementara APS penduduk perkotaan sudah mencapai 89,3 persen. Kesenjangan partisipasi pendidikan untuk kelompok usia 16 - 18 tahun tampak lebih nyata dengan APS penduduk perkotaan sebesar 66,7 persen dan APS penduduk pedesaan baru mencapai 38,9 persen. Tingkat keaksaraan penduduk pedesaan juga lebih rendah dibanding penduduk perkotaan dengan angka buta aksara penduduk usia

15 tahun ke atas di perkotaan sebesar 5,49 persen dan di perdesaan sebesar 13,8 persen. Pemerataan pendidikan juga belum disertai oleh pemerataan antar wilayah.

Keterbatasan masyarakat miskin untuk mengakses layanan pendidikan dasar terutama disebabkan tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Meskipun SPP untuk jenjang SD/MI telah secara resmi dihapuskan oleh Pemerintah tetapi pada kenyataannya masyarakat tetap harus membayar iuran sekolah. Pengeluaran lain diluar iuran sekolah seperti pembelian buku, alat tulis, seragam, uang transport, dan uang saku menjadi faktor penghambat pula bagi masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya.

Di samping itu sampai tahun 2008 ketersediaan fasilitas pendidikan untuk jenjang SMP/MTs ke atas di daerah perdesaan, daerah terpencil dan kepulauan masih terbatas. Hal tersebut menambah keengganan masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya karena bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan.

Pada umumnya orang meyakini bahwa dengan pendidikan manusia dapat memperoleh peningkatan dan kemajuan baik di bidang pengetahuan, kecakapan, maupun sikap dan moral. Pendidikan dipandang sebagai sarana intervensi kehidupan dan agen pembaharu juga sebagai instrumen untuk memperluas akses dan mobilitas sosial dalam masyarakat. Anggapan tersebut akan semakin memantapkan dan memperkokoh arti pendidikan dalam upaya menciptakan

peningkatan kualitas peserta didik atau yang lebih dikenal upaya pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam memasuki era globalisasi.

Ditinjau dari sudut hukum, definisi pendidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (1), yaitu “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Memperhatikan peranan pendidikan ini sudah selayaknya apabila setiap warga negara mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang dicanangkan pemerintah merupakan perwujudan amanat pembukaan UUD 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Program pendidikan wajib belajar di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1950. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 telah menetapkan bahwa setiap anak usia tujuh sampai lima belas tahun terkena pendidikan wajib belajar. Namun program pendidikan wajib belajar

yang dicanangkan oleh pemerintah belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena adanya pergolakan politik secara terus-menerus (Daliman, 1995:138).

Gerakan pendidikan wajib belajar sebagai suatu gerakan secara nasional dan sekaligus sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimulai sejak Pelita IV. Pada hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei 1984 Presiden Suharto secara resmi mencanangkan dimulainya pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar. Pada tahap ini penyelenggaraan pendidikan wajib belajar masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar dan diarahkan kepada anak-anak usia tujuh sampai duabelas tahun.

Ada dua hal yang mendorong dicanangkannya gerakan pendidikan wajib belajar tersebut. Hal pertama adalah masih banyaknya anak usia tujuh sampai duabelas tahun yang belum pernah bersekolah atau putus sekolah pada tingkat sekolah dasar. Pada tahun 1983 terdapat sekitar dua juta anak usia tujuh sampai duabelas tahun yang terlantar dan putus sekolah pada tingkat sekolah dasar. Sedangkan pada saat dicanangkannya pendidikan wajib belajar pada tahun 1984 masih terdapat kurang lebih 1,5 juta anak berusia 7 – 12 tahun yang belum bersekolah. Kenyataan kedua adalah adanya keinginan pemerintah untuk memenuhi ketentuan GBHN yang mencantumkan rencana penyelenggaraan pendidikan wajib belajar sejak GBHN 1978 maupun GBHN 1983. Gerakan pendidikan wajib belajar yang dimulai 2 Mei 1984 dipandang sebagai pemenuhan janji pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dasar secara cukup dan memadai,

sehingga cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang termaksud dalam Pembukaan UUD 1945 segera dapat diwujudkan (Mudjiman dalam Ismail: 2009).

Pendidikan wajib belajar meningkat menjadi pendidikan wajib belajar sembilan tahun dengan harapan terwujud pemerataan pendidikan dasar (SD dan SMP) yang bermutu serta lebih menjangkau penduduk daerah terpencil. Hal ini sesuai dengan [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional](#) sebagaimana yang tertuang pada pasal 34 sebagai berikut:

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

GBHN 1993 menyatakan bahwa pemerintah harus berupaya untuk memperluas kesempatan pendidikan baik pendidikan dasar, pendidikan menengah kejuruan, maupun pendidikan profesional, melalui jalur sekolah dan jalur luar sekolah. Dalam rangka memperluas kesempatan belajar pendidikan dasar, maka pada tanggal 2 Mei 1994 pemerintah mencanangkan program pendidikan wajib belajar sembilan tahun. Lebih lanjut juga dikemukakan bahwa tahap penting dalam pembangunan pendidikan adalah meningkatkan pendidikan wajib belajar enam tahun menjadi sembilan tahun.

Pendidikan wajib belajar sembilan tahun menganut konsepsi pendidikan semesta (*universal basic education*), yaitu suatu wawasan untuk membuka kesempatan

pendidikan dasar. Jadi sasaran utamanya adalah menumbuhkan aspirasi pendidikan orang tua dan peserta didik yang telah cukup umur untuk mengikuti pendidikan, dengan maksud untuk meningkatkan produktivitas angkatan kerja secara makro.

Maksud utamanya adalah agar anak-anak memiliki kesempatan untuk terus belajar sampai dengan usia limabelas tahun, dan sebagai landasan untuk belajar lebih lanjut baik dijenjang pendidikan lebih tinggi maupun di dunia kerja. Pelaksanaan pendidikan wajib belajar 9 tahun telah diatur lebih luas di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 bahwa sistem pendidikan nasional memberi hak kepada setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu dan juga berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat (pasal 5 ayat 1 dan 5).

Bagi warga negara yang memiliki kelainan emosional, mental, intelektual, dan atau sosial serta warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian juga warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus (pasal 5 ayat 2, 3 dan 4). Lebih jauh dijelaskan bahwa pendidikan wajib belajar 9 tahun bagi anak usia 7 sampai 15 tahun harus diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat tanpa dipungut biaya.

Merujuk pada paparan yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa ciri-ciri pelaksanaan pendidikan wajib belajar 9 tahun di Indonesia adalah; (1) tidak bersifat paksaan melainkan persuasif, (2) tidak ada sanksi hukum, (3) tidak diatur dengan undang-undang tersendiri, dan (4) keberhasilan diukur dengan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.

Wardiman Djojonegoro mengemukakan alasan-alasan yang melatar belakangi dicanangkannya program pendidikan wajib belajar 9 tahun bagi semua anak usia 7-15 mulai tahun 1994 yaitu:

1. Sekitar 73,7% angkatan kerja Indonesia pada tahun 1992 hanya berpendidikan Sekolah Dasar atau lebih rendah, yaitu tidak tamat Sekolah Dasar, dan tidak pernah sekolah. Jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN, seperti Singapura.
2. Dari sudut pandang kepentingan ekonomi pendidikan dasar 9 tahun merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat memberi nilai tambah lebih tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan rata-rata pendidikan dasar 9 tahun mereka dimungkinkan untuk memperluas wawasan mereka dalam menciptakan kegiatan ekonomi secara lebih beranekaragam.
3. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar peluang untuk lebih mampu berperan serta sebagai pelaku ekonomi dalam sektor-sektor ekonomi atau sektor-sektor industri.

4. Dari segi kepentingan peserta didik, peningkatan usia wajib belajar dari 6 tahun menjadi 9 tahun akan memberikan kematangan yang lebih tinggi dalam penguasaan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan. Dengan meningkatnya penguasaan kemampuan dan keterampilan akan memperbesar peluang yang lebih merata untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan, serta makna hidupnya.
5. Dengan semakin meluasnya kesempatan belajar 9 tahun, maka usia minimal angkatan kerja produktif dapat ditingkatkan dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

Berdasarkan alasan-alasan yang melatarbelakangi dicanangkan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat memberi nilai tambah pada diri individu (masyarakat) itu sendiri dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan tingkat perekonomian, hanya dapat dicapai lewat penuntasan pelaksanaan pendidikan untuk semua. Oleh karena itu, dengan adanya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun diharapkan setiap warga negara akan memiliki kemampuan untuk memahami dunianya, mampu menyesuaikan diri bersosialisasi dengan perubahan masyarakat dan jaman, mampu meningkatkan mutu kehidupan baik secara ekonomi, sosial budaya, politik dan biologis, serta mampu meningkatkan martabatnya sebagai manusia warga negara dari masyarakat yang maju. Dengan kata lain setiap orang harus memiliki potensi untuk bekerja di berbagai bidang dimanapun juga.

Jika perluasan dan mutu pendidikan dilakukan di dalam kerangka keterkaitan,

maka pendidikan dasar 9 tahun secara langsung berfungsi sebagai strategi dasar dalam upaya: (1) mencerdaskan kehidupan bangsa karena diperuntukkan bagi semua warga negara tanpa membedakan golongan, agama, suku bangsa, dan status sosial ekonomi; (2) menyiapkan tenaga kerja industri masa depan melalui pengembangan kemampuan dan keterampilan dasar belajar, serta dapat menunjang terciptanya pemerataan kesempatan pendidikan kejuruan dan profesional lebih lanjut; dan (3) membina penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena melalui Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun ini memungkinkan untuk dapat memperluas mekanisme seleksi bagi seluruh siswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Gerakan Wajib Belajar 9 Tahun pada dasarnya mempunyai maksud meningkatkan kualitas bangsa. Melalui pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun diharapkan setiap warga negara Indonesia memiliki kemampuan dasar yang diperlukan dalam kehidupan bangsa yang lebih tinggi, sehingga secara politis mereka akan lebih menyadari hak dan kewajiban, dan sebagai warga negara serta mampu berperan serta sebagai tenaga pembangunan yang lebih berkualitas.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun secara hukum merupakan kaidah yang bermaksud mengintegrasikan SD dan SMP secara konseptual, dalam arti tanpa pemisah dan merupakan satu satuan pendidikan. Pengintegrasian secara konseptual yang menempatkan SD dan SMP sebagai kesatuan program, dinyatakan melalui kurikulumnya yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Kedua bentuknya tidak diintegrasikan secara fisik dengan tetap berbentuk dua

lembaga yang terpisah, masing-masing dengan kelompok belajar kelas I sampai dengan Kelas VI untuk SD dan Kelas VII sampai Kelas XIII untuk SMP.

Berdasarkan kenyataan yang dipaparkan di atas, pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun bukanlah suatu kemewahan tapi suatu keharusan dan kebutuhan bagi setiap warga negara. Masalahnya yang dihadapi adalah bagaimana keharusan dan kebutuhan itu dapat dirasakan oleh setiap warga negara dan bukan kebutuhan para tokoh adat dan masyarakat. Inilah tantangan dan tanggung jawab para pejabat pemerintah terutama di lingkungan Kementerian Pendidikan untuk menjadikan setiap anggota masyarakat merasakan bahwa memperoleh pendidikan dasar 9 tahun adalah kebutuhannya.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun pada hakekatnya berfungsi memberikan pendidikan dasar bagi setiap warganegara agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pada konteks pembangunan nasional wajib belajar 9 tahun adalah suatu usaha yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar memiliki kemampuan untuk memelihara dunianya, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, mampu meningkatkan kualitas hidup dan martabatnya.

Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun merupakan perwujudan konstitusi serta tekad pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan pendidikan merupakan upaya menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa artinya meningkatkan kecerdasan kognitif dan kecerdasan emosional. Wajib belajar pada hakekatnya untuk memenuhi hak asasi setiap warganegara untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan prinsip pendidikan untuk semua (*education for all*). Tujuan adalah agar setiap warganegara memperoleh pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kenyataannya di lapangan saat ini program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun belum sesuai harapan karena saat ini rata-rata lama belajar baru 7,9 tahun. Oleh karenanya Pemerintah mengharapkan wajib belajar 9 tahun ditargetkan bisa mencapai 100 persen pada tahun 2012. Salah satu langkah yang ditempuh untuk mencapai target tersebut adalah dengan memberikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk semua siswa SD dan SMP di perkotaan dan perdesaan serta bantuan untuk siswa SMA/SMK. Selain BOS, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk beasiswa sebesar Rp 5,4 triliun bagi 8,2 juta siswa dan mahasiswa miskin dari total anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 290 juta.

Menurut data yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bandar Lampung, angka putus sekolah untuk tingkat SD sampai SMA di kota Bandar Lampung adalah sekitar 0,3%. Angka tersebut lebih rendah dari target pemerintah pusat yang mencapai 0,7% pada tahun 2014 mendatang. Angka putus sekolah di kota Bandar Lampung tergolong rendah karena pemerintah kota mengantisipasi agar keterbatasan biaya tidak menghalangi akses masyarakat pada pendidikan. Akibatnya tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak menyekolahkan anak. Pemerintah Kota Bandar Lampung menggulirkan program bina lingkungan yaitu suatu kebijakan dimana sekolah negeri harus menyediakan 30% tempat bagi siswa kurang mampu yang tinggal di sekitar sekolah. Pemerintah Kota juga melakukan pemberian bantuan sumbangan biaya pendidikan dan bantuan perangkat sekolah berupa dua pasang seragam, sepatu, tas dan buku. Program bina lingkungan yang diprogramkan. Bantuan ini diberikan kepada siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

2.5 Karakteristik Masyarakat Pesisir

Wilayah pesisir sebagai suatu wilayah peralihan antara darat dan laut merupakan wilayah strategis karena memiliki potensi sumber daya alam yang sangat kaya. Namun ironisnya kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir justru jauh tertinggal dari kelompok masyarakat lainnya. Masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang mendiami suatu wilayah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Menurut Kusumastanto (2003:62-63) ada karakteristik dan dinamika yang khas pada masyarakat pesisir yaitu bahwa kemiskinan,

ketertinggalan dan keterbelakangan kawasan maupun ekonomi adalah fenomena yang melekat. Realitas ini dapat dilihat dari beberapa hal, seperti:

1. Warisan kemiskinan di masyarakat yang menjadi fenomena keseharian mereka.
2. Kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan tingkat pendidikan formal yang masih rendah. Tingkat pendidikan masyarakat ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 68,1 % tidak tamat SD; 28,2 % hanya tamat SD dan 3,7 % memiliki jenjang pendidikan di atas SD.
3. Konflik sektoral yang mewarnai persoalan pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan.
4. Tingkat inovasi teknologi yang rendah karena aliran investasi ke sektor ini belum mampu mendorong perubahan tingkat teknologi pemanfaatan sumberdaya bagi nelayan dan kelompok masyarakat pesisir lainnya.

Banyak masyarakat pesisir, khususnya nelayan, yang masih hidup di bawah garis kemiskinan karena mereka hanya mengandalkan hidup dengan melaut saja., padahal sebenarnya masih banyak pekerjaan sampingan yang bisa mereka lakukan ketika sedang tidak melaut. Meskipun banyak program pemberdayaan masyarakat namun program-program tersebut hanya bertahan seumur masa proyek dan tidak menimbulkan dampak yang berarti bagi kehidupan masyarakat. Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk menentukan serta merencanakan kebutuhan mereka, yang pada akhirnya menciptakan kemandirian dalam kehidupan mereka sendiri.

Beberapa pakar ekonomi menyatakan bahwa nelayan tetap mau tinggal dalam lingkaran kemiskinan karena mereka memperoleh kepuasan tersendiri dari hasil menangkap ikan tersebut (Panayotou dalam Febriyanti, 2012). Karena keterbatasan pengetahuan dan minimnya alat tangkap yang dimiliki, nelayan cenderung menggunakan teknologi tradisional untuk menangkap ikan. Tidak terpenuhinya kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur semakin memperburuk keadaan masyarakat ini. Pada saat yang bersamaan pemerintah banyak membuat kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat pesisir, bahkan nelayan sering disebut sebagai masyarakat termiskin dari masyarakat lainnya (*the poorest of the poor*). Nelayan dan komunitas masyarakat pesisir lainnya adalah bagian dari kelompok masyarakat miskin pada level yang paling bawah sehingga kerap menjadi kelompok yang paling rentan dan tidak berdaya.

Di dalam masyarakat pesisir terdapat beberapa kelompok diantaranya:

- a) Masyarakat tangkap, yaitu kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Kedua kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.
- b) Masyarakat pengumpul/bakul, yaitu kelompok masyarakat pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat

sekitarnya atau dibawah ke pasar-pasar lokal. Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir perempuan.

- c) Masyarakat buruh, yaitu kelompok masyarakat yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka dan tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal (ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim.
- d) Masyarakat tambak, masyarakat pengolah, dan kelompok masyarakat buruh.
(Efrizal: 2001)

Setiap kelompok masyarakat tersebut harus mendapat penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, dan aktivitas ekonomi mereka. Misalnya masyarakat tangkap membutuhkan sarana penangkapan dan kepastian wilayah tangkap. Sementara itu kelompok masyarakat tambak membutuhkan modal kerja dan modal investasi. Kebutuhan setiap kelompok yang berbeda tersebut menunjukkan keanekaragaman pola pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok tersebut. Pemerintah juga telah membuat beberapa kebijakan untuk melaksanakan pembangunan masyarakat nelayan, diantaranya:

- a) Mendorong masyarakat untuk tumbuh secara mandiri dengan memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan hidup minimum.
- b) Mendorong dan meningkatkan aktivitas, kreativitas, prestasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

- c) Meningkatkan swadaya dan produktivitas masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan taraf hidup.
- d) Memanfaatkan peranan lembaga-lembaga masyarakat sebagai wadah partisipasi dalam pembangunan. (Dahuri:1996)

Pembangunan masyarakat nelayan tersebut mengalami berbagai kendala yang cukup berat, antara lain karena kurangnya prasarana fisik, terbatasnya keterampilan penduduk, rendahnya tingkat pendapatan, kelangkaan lembaga keuangan yang dapat bisa membantu permodalan nelayan, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan serta terbatasnya kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan keterpaduan dan koordinasi antara pelaksana pembangunan, terutama pada masyarakat nelayan sendiri. Strategi yang harus diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini adalah dengan membantu mereka untuk berkembang atas dasar kemampuan mereka sendiri sekaligus mengembangkan potensi lingkungan sekitar.

2.6 Pendidikan dalam Sistem Kehidupan Masyarakat Pesisir

Tujuan pendidikan adalah sesuatu yang sering dipertanyakan masyarakat. Ada dua teori yang berbeda mengenai tujuan pendidikan. Rousseau lebih mementingkan pendidikan individu daripada pendidikan masyarakat dengan asumsi bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan baik dan suci, dan walaupun manusia itu rusak hal itu disebabkan manusia itu sendiri atau karena masyarakatnya.

Namun John Dewey berpendapat sebaliknya. Menurutnya pendidikan lebih dibutuhkan masyarakat daripada individu karena tujuan pendidikan adalah untuk menjadikan manusia sebagai warga negara yang baik. Pemikiran Dewey ini didasarkan pada kenyataan bahwa manusia tidak bisa hidup secara individual dan harus tinggal dalam komunitasnya.

Dari kedua pendapat di atas maka pendidikan tidak boleh mengabaikan individu dan masyarakat karena pada dasarnya pendidikan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan individu yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

The World Bank pernah mengemukakan sebuah pernyataan pada tahun 1999 yang menyebutkan *Give people a handout or a tool, and they will live a little better. Give them education, and they will change the world.* Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan adalah sarana terpenting untuk mengubah keadaan dan taraf hidup seseorang karena pendidikan dapat meningkatkan mutu hidup manusia baik secara struktural, kultural maupun emosional (Rivai dan Murni, 2009:777).

Perubahan yang dimaksud oleh Bank Dunia itu adalah perubahan yang mempengaruhi tatanan kehidupan manusia agar siap menghadapi semua tantangan. Tantangan yang ada tidak dijadikan sebagai halangan namun justru dijadikan sebuah peluang untuk melakukan perbaikan mutu kehidupan. Bank Dunia melihat ada sebuah kecenderungan bahwa masyarakat secara global terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat yang sangat maju dan masyarakat yang terbelakang. Kehidupan

pada masyarakat maju sangat dipengaruhi dan tergantung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara pada masyarakat terbelakang masih gagap atau menjauhi teknologi. Implikasi dari kedua kelompok masyarakat ini adalah bahwa ada kelompok yang siap mengatur tatanan hidup secara global dan kelompok yang lain cenderung mudah diombang-ambingkan kelompok masyarakat yang sudah siap menghadapi masa depan. Kelompok masyarakat yang siap memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan secara kreatif dan inovatif bahkan mungkin menciptakan penemuan baru yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Terkait uraian di atas Bank Dunia menyimpulkan bahwa pendidikan dianggap lebih efektif dalam membentuk dan melakukan perubahan. Oleh karena itu bila ingin melakukan perubahan tingkah laku yang pada akhirnya akan mengubah dunia, berilah pendidikan kepada masyarakat. Pendidikan memberikan peluang kepada setiap orang untuk dapat berbuat lebih baik bagi diri sendiri dan lingkungannya. Pendidikan juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan mutu hidup dan kehidupan, meningkatkan kesejahteraan, menurunkan kemiskinan, mengembangkan potensi yang dimiliki dan memberikan dorongan untuk pencerahan di masa depan.

Pada konteks kehidupan manusia, pendidikan memiliki dimensi ekonomi dan sosial. Secara ekonomi pendidikan dapat menjadi sebuah instrumen untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan. Secara

sosial pendidikan dapat meningkatkan kebersamaan dan memunculkan keinginan untuk menghormati hak dan kewajibannya sebagai bagian dari warga masyarakat.

Berkaitan dengan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, pendidikan di Indonesia saat ini hanya tersedia untuk golongan mampu. Pemerintah belum mampu mewujudkan wajib belajar sembilan tahun yang bermutu, adil, dan bebas biaya. Seharusnya semua siswa dari semua latar belakang berhak mengenyam pendidikan dasar 9 tahun yang dibiayai pemerintah.

Pemerintah seharusnya mengacu pada negara-negara maju, seperti Amerika dan Jerman untuk mewujudkan wajib belajar sembilan tahun tersebut. Di negara tersebut, anak usia sekolah mendapatkan pengawasan yang lebih ketat. Jika ada anak usia sekolah yang berkeliaran di luar sekolah pada jam belajar, anak tersebut akan "ditangkap" dan orangtuanya dipanggil. Namun di Indonesia masih banyak anak usia sekolah yang putus atau tidak melanjutkan sekolah yang bebas berkeliaran di jalan. Hal itu terjadi karena pemerintah tidak mampu menghitung berapa dana pendidikan yang diperlukan, khususnya untuk mewujudkan wajib belajar sembilan tahun. Selama ini pemerintah hanya sebatas mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada pendidikan tanpa menghitung berapa yang diperlukan. Lebih dari setengah APBN tersebut habis untuk membayar gaji guru. Hal itu berimbas pada kurangnya dana pendidikan yang dimiliki pemerintah sehingga pendidikan menjadi tidak gratis dan masyarakat ekonomi lemah tidak sanggup memenuhinya.

Pada akhir abad ke-20 akan ada pergeseran paradigma yaitu bahwa pembangunan ekonomi berbasis sumber daya kekayaan alam akan bergeser ke pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan, yaitu pendidikan. Oleh karena itu program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun memang dijadikan hal yang substansif dan harus diselesaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama karena sudah ada wacana untuk merintis Wajib Belajar 12 tahun mulai tahun 2012 ini. Dengan adanya peningkatan alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS), tidak boleh ada anak yang tidak mengenyam pendidikan. Pada tahun 2012 akan ada kenaikan *unit cost*, yaitu bagi siswa SD dari Rp 380.000 menjadi Rp 510.000. Sementara bagi siswa SMP, dari Rp 580.000 menjadi Rp 710.000. selain itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan merintis dana BOS bagi siswa SMA pada 2012 mendatang (Nuh, M.: 2011)

Masalah yang dihadapi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat di wilayah pesisir melalui pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan pendidikan yang merata, namun juga kualitas yang tinggi. Diharapkan dengan adanya peningkatan pendidikan ini masyarakat di wilayah pesisir semakin mengetahui dan mampu mengelola perairan dan perikanan laut untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Dari segi kuantitas memang sudah semakin banyak penduduk yang menikmati pendidikan dasar. Demikian pula pemerintah juga telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui tenaga pengajar, kurikulum, dan fasilitas, terutama dengan kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. (Dahuri:1996)

Sejalan dengan kebijakan tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga ikut membenahi sektor pendidikan keluarga nelayan. Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP) membidik kesejahteraan lewat pendidikan. Di Indonesia saat ini persentase nelayan hampir mencapai 25 persen dari jumlah penduduk tanah air. Dari jumlah tersebut, keluarga nelayan miskin dan putus sekolah masih cukup tinggi. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai membenahi sektor pendidikan melalui Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan. Anak nelayan Indonesia harus mendapatkan pendidikan dan keterampilan sehingga mampu terjun ke lapangan. Karena karakteristiknya yang berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain maka anak-anak nelayan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Dalam hal ini, pola pikir (*mindset*) tenaga pendidik yang menangani mereka harus berbeda.

Untuk mempercepat langkah itu pemerintah telah berencana untuk mendirikan Institut Kelautan dan Perikanan Nasional (IKPN) yang merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Perikanan (STP) dan Akademi Perikanan (AP) yang bertaraf internasional. Dalam hal ini Indonesia akan bekerja sama dengan Korea Marine Institut (KMI) untuk membangun institut tersebut di Karawang, Jawa Barat.

Selain pembangunan kampus dan sekolah perikanan pemerintah juga menganggarkan beasiswa sebesar Rp 20 miliar untuk anak-anak nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan. Beasiswa tersebut meliputi biaya pendidikan

dan biaya hidup selama menempuh pendidikan. Diharapkan program ini bisa menarik minat lebih banyak anak nelayan untuk meneruskan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi.

2.7 Peran Serta Masyarakat Pesisir dalam Pendidikan

Masyarakat memiliki organisasi massa yaitu Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang telah berumur 38 tahun. Diharapkan organisasi ini dapat lebih memainkan peran strategisnya untuk membantu mengangkat harkat dan martabat seluruh nelayan di Indonesia. Salah satu peran strategis dimaksud adalah mendorong para pemerintah daerah untuk memperhatikan kualitas pendidikan anak-anak nelayan.

Saat ini masih terdapat ketimpangan antara fakta geografis dan kekuatan potensi kelautan kita dengan tingkat kemajuan dan kesejahteraan nelayan Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu HNSI sebagai salah satu organisasi yang solid, tentunya mempunyai kekuatan yang diperhitungkan yang dapat membantu upaya-upaya mengangkat derajat nelayan Indonesia.

Kemiskinan yang terjadi pada nelayan merupakan salah satu ancaman bagi kelestarian sumber daya pesisir dan lautan. Tuntutan hidup dan desakan ekonomi sering memaksa petani untuk mengeksploitasi sumber daya perairan dan kelautan tanpa memperdulikan akibat yang bisa ditimbulkan. Pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi agenda penting karena masyarakat yang mendominasi daerah

tersebut adalah nelayan. Pemberdayaan ini difokuskan pada peningkatan kecerdasan nelayan agar mereka memahami cara memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan serta bagaimana cara mengentaskan kemiskinan. Beberapa pemecahan yang mungkin dilakukan antara lain:

1. Memberdayakan nelayan agar tidak bergantung pada hasil melaut saja tapi juga pada mata pencaharian lain seperti pembudidaya ikan supaya mereka memiliki pendapatan relatif dan tidak terlalu tergantung pada musim.
2. Mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di sektor kelautan dan perikanan yang sedang digalakkan pemerintah. Program ini dijalankan melalui pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis pada sumber daya lokal, sehingga nelayan dapat mengembangkan usaha sesuai kemampuan dan kebutuhan mereka.
3. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat sehingga nelayan yang buta huruf minimal dapat membaca dan lulus dalam Kejar Paket A atau Kejar Paket B. Anak-anak nelayan diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan tingkat menengah sehingga nantinya mereka dapat mengakses perkembangan teknologi, khususnya bidang kelautan dan perikanan.
4. Mendukung Program Mitra Bahari (PMB) yang merupakan program kemitraan antara Departemen Kelautan dan Perikanan dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, kelompok masyarakat dan stakeholder lainnya. (Febriyanti, 2012)

Sektor perikanan harus dibenahi melalui pendidikan karena usaha perikanan memiliki sifat yang khusus. Untuk masuk ke bidang ini dibutuhkan energi yang

besar dan lokasinya pun jauh di tengah lautan. Oleh karenanya dibutuhkan orang-orang yang memiliki keahlian yang bagus, dengan fisik yang kuat dan baik, serta teknologi yang tinggi. Jadi untuk menghasilkan sumber daya manusia bidang kelautan dan perikanan yang tangguh sebaiknya berasal dari komunitas kelautan dan perikanan itu sendiri. Anak-anak nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan yang sejak usia 0-15 tahun sudah merasakan udara laut dan hidup di lingkungan laut memiliki kearifan lokal. Anak-anak inilah yang seharusnya bersekolah di bidang kelautan dan perikanan. Dengan ilmu dan kearifan lokal yang mereka miliki dan jika mereka dididik secara militer, maka mereka akan siap secara mental, teknologi dan keterampilan untuk bekerja di dunia kelautan dan perikanan. (Situmorang, 2012)

2.8 Penelitian yang Relevan

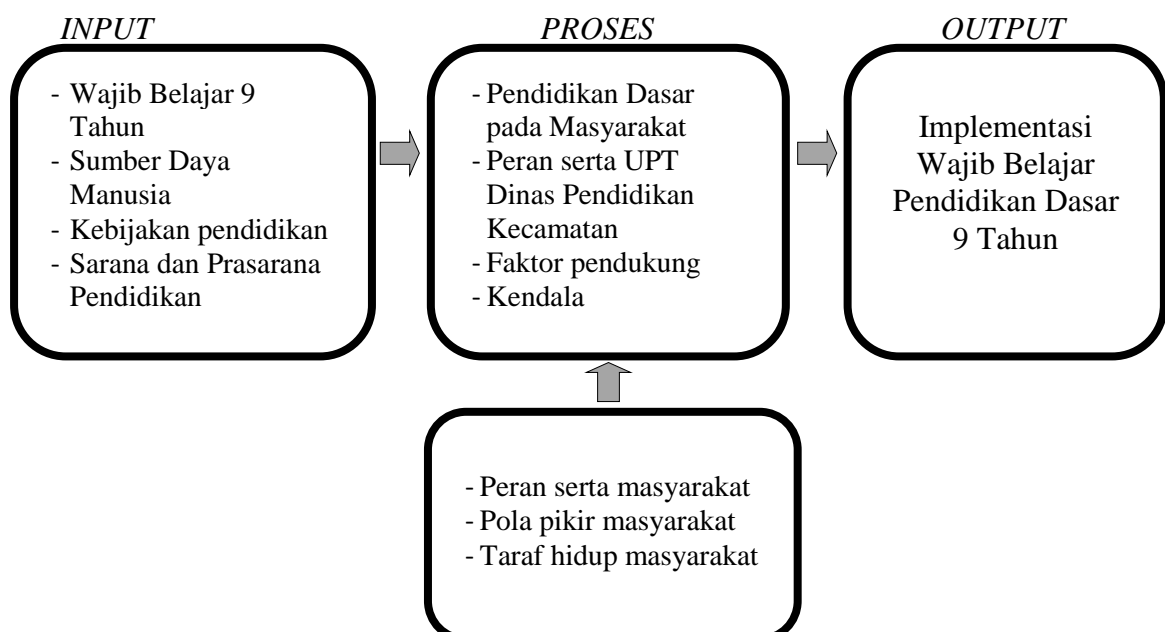
Hasil kajian akademisi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung menunjukkan bahwa pada tahun 2010 – 2011 APK anak usia SMA di Lampung hanya 58,04 persen. APK merupakan jumlah anak yang masih bersekolah formal dibandingkan dengan total anak usia sekolah yang seharusnya menempuh pendidikan. Hal ini berarti terdapat 41,96 persen anak usia SMA yang tidak bersekolah. Merujuk pada angka tersebut, terlihat adanya ketimpangan yang tinggi pada partisipasi pendidikan formal di provinsi Lampung. Angka APK ini adalah yang terendah dari 33 propinsi di Indonesia, dan jauh lebih rendah dibandingkan APK tingkat SD sebesar 100 persen dan tingkat SMP sebesar 98 persen. (Thoha, 2012)

2.9 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir adalah bagian teori dari penelitian yang menjelaskan tentang alasan atau argumentasi bagi rumusan hipotesis, akan menggambarkan alur pikir peneliti dan memberikan penjelasan kepada orang lain tentang hipotesis yang diajukan (Arikunto, 2006:99)

Berdasarkan teori-teori yang telah disampaikan, peneliti mengasumsikan bahwa program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun akan terlaksana pada masyarakat di pesisir Teluk Lampung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung jika ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai dan didukung oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Dengan melihat kekhasan lingkungan dan fenomena masyarakat di wilayah pesisir serta mempertimbangkan kendala yang dihadapi, maka akan terlihat dampak program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun terhadap pendidikan anak usia pendidikan dasar. Kerangka pikir digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1: Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 2.1 menunjukkan bahwa dengan adanya Pendidikan Dasar pada Masyarakat Pesisir, sarana dan prasarana pendidikan, peran UPT Dinas Pendidikan Kecamatan, faktor pendukung dan kendala, diharapkan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dapat dituntaskan pada tahun 2012 ini.

Tuntasnya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Teluk Betung Barat adalah dengan memperhatikan sumber daya manusia pada masyarakat pesisir serta dukungan pemerintah berupa kebijakan pendidikan yang tepat untuk kelompok masyarakat ini. Demikian pula peran serta dan pola pikir masyarakat sangat berpengaruh terhadap ketuntasan program ini. Dengan berubahnya pola pikir masyarakat sekarang yang mulai menganggap pendidikan sebagai hal yang penting maka taraf hidup masyarakat diharapkan akan berangsur-angsur meningkat.